

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM
KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

OLEH :

ROMULUS, SH

A.2021141042

Pembimbing I : Dr. Aswandi,SH.,M.Hum

Pembimbing II : Fransiscus,SH.,M.Hum

ABSTRACT

The thesis is the imposition of criminal sanctions under the minimum limit is specialized in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics (Studies in Kuala Kapuas District Court's Decision No. 103 / Pid.Sus / 2015 / PN KIK). The method used in this research is a normative approach. From the results of this thesis research we concluded that existence of sentences below the minimum threshold specific provisions of the law in the case of narcotic crime committed by judges, including judges PN Kuala Kapuas, can not be justified by the principle of legality (*nulla poena sine lege*) which in which an element of legal certainty, for the principle of *nulla poena sine lege*, which means "no crime without law", has firmly declared that any criminal sanctions should be determined in the legislation. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. As in the Narcotics Act itself has clearly stipulate provisions criminal threats within minimum and maximum limits, such as the Article 112 paragraph (1), which regulates criminal sanctions for any person who unlawfully or against the law to plant, maintain, own, storing, controlling, or provides Narcotics Group I in the form of plants, with a term of imprisonment of 4 (four) years and a maximum of twelve (12) years, so the presence of sentences below the minimum threshold of criminal penalty provisions contained in the Act Narcotics Act by judges themselves can not be justified by the principle of *nulla poena sine lege* this. As for the opinion of the judges PN Kuala Kapuas, criminal acts dropped below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics conducted by a judge does not violate the principle of legality, because the criminal punishment intended for the realization of justice for the accused and society. And according to the judge, when there is a conflict between justice and legal certainty it is only logical certainty justice takes precedence over *hukum*. Pertimbangan taken by judges in imposing criminal Kuala Kapuas below the minimum threshold of Narcotics Undang-Undang provisions include the following: (a) consideration juridical, include: the indictment and the warrant from the public prosecutor the evidence revealed at the hearing that consisted of witness testimony, letters and testimony from the accused the evidence, the articles of the Narcotics Act the statutory provisions (b) consideration non juridical, include: a description of the condition of the accused himself and also the role or status of the accused in the crime. Things are burdensome and relieve the defendant, a sense of justice and humanity for the future interests of the accused. Associated with a sense of justice to be considered by the judge in imposing a punishment below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics, there is the argument of the judges PN Kuala Kapuas saying that for the criminal offender whose only role as a user that are still try and just have evidence very mild narcotic should not be punished hard. From this argument can be said that there is a pity that arise in the judge against the criminal offender, where such arguments is called the *Argumentum ad Misericordian*. The judge then concluded that if there is a conflict between justice and legal certainty the main priority is justice.

Keywords: The imposition of criminal sanction, below the minimum limit special.

ABSTRAK

Tesis ini penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103/Pid.Sus/2015/PN KIk). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh hakim, termasuk hakim PN Kuala Kapuas, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas *nulla poena sine lege*, yang berarti "tiada pidana tanpa undang-undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas *nulla poena sine lege* ini. Adapun menurut pendapat hakim PN Kuala Kapuas, tindakan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh seorang hakim tidaklah melanggar asas legalitas, sebab penjatuhan pidana tersebut bertujuan demi terwujudnya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Dan menurut hakim, apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibanding kepastian hukum. Pertimbangan yang diambil oleh hakim Kuala Kapuas dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika diantaranya adalah : (a) pertimbangan yang bersifat yuridis, meliputi : surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum alat bukti yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan perundang-undangan (b) pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi : penjelasan mengenai kondisi diri terdakwa dan juga peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, rasa keadilan dan kemanusiaan bagi kepentingan masa depan terdakwa. Terkait dengan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, terdapat argumentasi dari hakim PN Kuala Kapuas yang mengatakan bahwa untuk pelaku pidana yang perannya hanya sebagai pengguna yang sifatnya masih coba-coba dan hanya memiliki barang bukti narkotika yang sangat ringan tidak selayaknya dijatuhi pidana yang berat. Dari argumentasi ini dapat dikatakan bahwa ada rasa kasihan yang timbul dalam diri hakim terhadap pelaku pidana, dimana argumentasi semacam ini dinamakan dengan *Argumentum ad Misericordiam*. Sehingga hakim kemudian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum maka yang diutamakan adalah keadilan.

Kata Kunci: Penjatuhan, sanksi pidana, di bawah batas minimum khusus.

Latar belakang.

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang berlangsung di Negara Indonesia maka semua masyarakat disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman untuk manata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan sosial (social engineering), dan hukum sebagai sarana integratif.¹ Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Dari sudut pandang operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya, hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan, kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan Legislatif/Formulatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Pihak yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan Aplikatif/Yudikatif.

¹ Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 127-146.

3. Tahap Eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan Eksekutif/Administratif.²

Dari ketiga tahap tersebut di atas, maka tahap formulasi atau tahap penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.³

Dalam rangka penegakan hukum "*law enforcement*" terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak dicapai, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diketahui tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari semua tindakan criminal yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

² Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 111

³ Barda Nawawi Arief. 1993. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta:Renika Cipta, 2002, hal. 1.

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁵ Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan.⁶ Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia, oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁸ Sistem ini terdiri atas sub-sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (*totalitas*) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (*jangka pendek*), pencegahan kejahatan (*jangka menengah*), dan kesejahteraan sosial (*jangka panjang*).⁹

Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar atau sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hal. 84.

⁶ Ibid, hal. 85.

⁷ Ibid, hal, 84-85.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 7.

⁹ Ibid.

adalah pengadilan karena didalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁰

Pada hakekatnya tugas pokok hakim sudah tercantuk dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.¹¹ Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:¹²

- a. Hukuman-hukuman pokok:
 1. hukuman mati,
 2. hukuman penjara,
 3. hukuman kurungan,
 4. hukuman denda;
- b. hukuman-hukuman tambahan:
 1. pencabutan beberapa hak yang tertentu,
 2. perampasan barang yang tertentu,
 3. pengumuman keputusan hakim.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternative dalam pencantuman sanksi pidana.¹³ Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Di dalam perkembangan

¹⁰ Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹¹ Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹³ Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107.

pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.¹⁴

Dengan adanya sistem pidana Minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika semakin bertambah/meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunaanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67). Pada bagian menimbang dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan:

“bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.”

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 Nopember 2007.

Undang - undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan dapat memberikan efek jera. Namun, permasalahannya Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem pemidanaan” yang di dalamnya mencakup “pola pemidanaan” dan “pedoman pemidanaan”, yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang - undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan “pedoman pemidanaan” adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif”/”pedoman aplikatif”).

Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat. Memang saat ini kita sudah memiliki UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses, prosedur penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Sedangkan dalam undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang “pemidanaan”, setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Meski Indonesia belum memiliki “pola pemidanaan” yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Dalam pandangan umum bahwa penegakan hukum selalu mempunyai tujuan dan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dapat pula menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Tetapi dalam praktik, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem *alternative* dalam pencantuman sanksi pidana.¹⁵ Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam

¹⁵ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 107

menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Hal tersebut sering terjadi dalam lingkup peradilan. Terdapat suatu asas hukum yang menyatakan bahwa hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.¹⁶ Di dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunaanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.¹⁷ Dengan ketentuan tersebut di atas menarik untuk mengupas kemandirian hakim dalam peranannya menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang menjadi wewenangya, terutama untuk tindak pidana narkotika yang secara khusus mengatur tentang batas minimal sanksi pidananya.

Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya

¹⁶ Soelidarmi. 2002. *Kumpulan Putusan Kontraversial dari Hakim/Majelis Kontraversial*. Yogyakarta: UII Press, hlm. IX

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14

pedoman tersebut, seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal.¹⁸

Dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 103/Pid.Sus/2015/PN KIk Tanggal 15 Mei 2015, diketahui bahwa terhadap terdakwa yang bernama Salhah Binti H. Darmasi, umur 31 tahun, hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak bisa dibayar, maka diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan latihan kerja, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dibawah ketentuan minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Sehubungan dengan hal di atas tentang masalah disparitas pidana, Muladi berpendapat bahwa yang dikehendaki bukanlah putusan yang sama terhadap perkara yang sama, tetapi adanya rasionalitas dalam pertimbangan yang dijadikan dasar putusan terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, akan dihasilkan putusan yang rasional dan dapat diterima banyak pihak. Lebih lanjut Muladi menulis :

.....Namun yang lebih penting adalah, perlunya penghayatan azas proposionalitas dalam penjatuhan pidana, yakni proposionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan paritas pidana (parity sentencing) seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasar pedoman pemidanaan.¹⁹

Penerapan sanksi pidana khusus terjadi ketika hakim memutuskan dengan sanksi maksimum dan minimum. Namun, muncul persoalan baru dan seringkali terjadi yakni terdapat suatu putusan tidak sampai pada ketentuan standar minimum. Hal tersebut memungkinkan terjadi putusan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Penerapan sanksi pidana dalam pidana khusus telah ditegaskan apabila ada ketentuan standar maksimum dan minimum yang kemudian menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni Press, hlm. 27

¹⁹ Aryadi Gregorius. 1995. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 3

Kekuasaan kehakiman akan berimplikasi terhadap penegakan hukum oleh hakim di persidangan, karena sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan objektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Terdapat beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim, misalnya: benteng terakhir bagi pencari keadilan, selain hal tersebut, hakim merupakan *ultimum remedium*, yang menjadi alat utama bagi semua ketidakberesan, karenanya, terdapat ungkapan yang cukup ekstrim bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak semuanya akan menjadi sempurna.²⁰

Pendapat lain diutarakan Bismar Siregar “dengan demikian berarti bahwa hakim adalah wakil Tuhan yang mengatasnamakan keadilan”. Hal tersebut menandakan bahwa tugas hakim harus berani untuk memikul tanggung jawab baik dunia maupun akhirat.²¹

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim berpedoman pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.²²

Ketentuan standar maksimum dan minimum dalam proses legislasi masih menunjukkan kecenderungan belum memperlihatkan keseriusan dalam menentukan *public policy* dan *sentencing policy* yang kemudian menjadi masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana.²³

Berbagai putusan hakim yang memutuskan suatu perkara pidana di bawah batas minimum mengakibatkan putusan tersebut menjadi *inkonsisten*, Karena penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat meskipun terdapat suatu teori yang membenarkan. Di samping itu, hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Tanpa adanya

²⁰ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 87

²¹ Wahyu Affiandi. 1999. *Hakim dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 111

²² Muladi. *Op.cit.*, hlm. 88

²³ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak akan menemukan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Hal tersebut telah dijelaskan dalam buku Sudikno Mertokusumo, jika undang-undang tidak lengkap, maka hakim wajib menemukan hukum dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsipnya, hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*). Jadi hakim harus kreatif.²⁴

Penjatuan sanksi pidana di Indonesia, yaitu menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuan sanksi pidana, karena seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ditentukan maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum, Pasal 12 ayat (2) dalam KUHP telah dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasalanya tanpa mengatur minimum khususnya.

Ketentuan maksimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sedangkan ketentuan minimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 1 (satu) hari dan untuk pidana kurungan adalah selama 1 (satu) hari. Kemudian dengan diaturnya sistem maksimum umum dan khusus serta dengan minimum umum maka hakim dapat menjatuhkan pidana bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 137

rendah. Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penyertaan (*delneeming*), percobaan (*poging*), perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) dan lain-lain, serta alasan pemberatan dan peringanan pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya dapat diperberat dan diperingan, sedangkan dalam sistem minimum khusus belum ada pedoman yang mengatur mengenai hal-hal seperti tersebut di atas.

Tidak adanya sistem minimum khusus dalam tiap-tiap pidana yang tercantum dalam pasal KUHP, maka hakim mempunyai kebebasan yang luas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, akibat dari ketentuan ini terkadang tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya sama dijatuhi pidana yang berbeda-beda (disparitas pidana). Hal tersebut terdapat kelebihan jika dicantumkan sistem minimum khusus dalam setiap pasal undang-undang pidana. Untuk mencapai hukum yang lebih baik dan lebih mengutamakan keadilan maka diadakan pembaharuan hukum pidana, sehingga di dalam rancangan konsep KUHP dan beberapa perundang-undangan pidana khusus telah menggunakan sistem minimum.²⁵

Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pidana yang menyimpang dari KUHP yang sekarang berlaku. Hal tersebut dalam KUHP diatur dalam pasal 103 bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku I berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Bunyi pasal tersebut merupakan dasar hukum untuk lahirnya pidana khusus. Sebagai pidana khusus, tindak pidana narkoba mengatur ketentuan yang menyimpang dari KUHP.

Dari formulasi sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang narkoba, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.

²⁵ Rien G Kartasapoetra. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 68

2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.
3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Beragamnya rumusan *strafmaat* dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya “pola pemidanaan” yang dapat dipedomani oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi. Hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pemegang kebijakan legislasi dalam membuat undang-undang pidana membutuhkan keseriusan dan harus mendapat perhatian khusus dari lembaga legislasi yang bertindak selaku pemegang kebijakan dalam merumuskan pidana minimum khusus.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas adalah Apa dasar pemikiran perlunya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

Pembahasan

1. Hakim

Hakim (Pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dimana menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.²⁶ Adapun komponen lainnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta : Universitas Indonesia, 2007, hal. 140.

Di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Ditangannya seorang terdakwa bisa saja dijatuhi pidana mati, dihukum seumur hidup, atau bahkan dibebaskan dari segala kesalahan. Di dalam KUHAP sendiri, khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang beraslah melakukannya.

Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.²⁷ Keyakinan hakim yang subyektif ini tidak serta merta mempunyai arti bahwa hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan. Dimana menurut Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak.²⁸

Dapat dikatakan bahwa keberadaan hakim di dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting di dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang diambilnya.

1) Kekuasaan Kehakiman

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.²⁹ Secara umum kekuasaan kehakiman ini dapat dikatakan sebagai alat negara penegak hukum, seperti halnya kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi sifat dan tempatnya menurut hukum ketatanegaraan berbeda dengan kedua institusi tersebut.

²⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, cet. 1, Bandung : Alumni, 2005, hal. 24.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op. Cit., hal. 71.

²⁹ Bambang Sutyoso, Op. Cit., hal. 5.

Kekuasaan Kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam undang-undang.³⁰

Secara khusus tentang kekuasaan kehakiman itu sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa perubahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang membawahi semua lingkungan peradilan di Indonesia, baik lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara.³¹ Selanjutnya berdasarkan bunyi Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang yakni :

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, sudah barang tentu membutuhkan kebebasan dari

³⁰ Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1994, hal. 25.

³¹ Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

segala bentuk pengaruh badan-badan kenegaraan lainnya, sebab begitu pentingnya dan urgensinya lembaga ini untuk mengemban tugas dalam penegakan hukum yang berintikan keadilan.³² Menurut pendapat dari Oemar Seno Adji, mengatakan bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional – yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, disebut sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum bagi Indonesia.³³

Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.³⁴

Berkenaan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, ada pendapat dari Sudikno Mertokusumo, dalam makalah yang disampaikan pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/ untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam/ untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan”.³⁵

Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan kehakiman dalam arti luas, yaitu “kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan

³² Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta : UII Press, 2010, hal. 35.

³³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta : Erlangga, 1985, hal. 251.

³⁴ Sarwata, *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhannas, 19 Agustus 1997, hal. 3-6.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makalah disampaikan dalam Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di UGM tanggal 26 Agustus 1995, hal. 2).

mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan peradilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakkan hukum.³⁶ Lebih lanjut Barda mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri” harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Artinya keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (yaitu “kekuasaan penyidikan”, “kekuasaan penuntutan”, “kekuasaan mengadili”, dan “kekuasaan eksekusi pidana”) seharusnya merdeka dan mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/ eksekutif.³⁷

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang judicial, yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Lebih lanjut kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁸ Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman haruslah disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum.³⁹

Kemandirian kekuasaan kehakiman disini dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :⁴⁰

1. Kemandirian lembaganya

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilanannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga lain ataukah tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan lembaga-lembaga lainnya, dan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, (Makalah sebagai bahan masukan untuk Penyusunan Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman Periode 1998/1999, hal. 3).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Bambang Sutiyo, *Loc. Cit*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hal. 52-

juga apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkhis ke atas secara formal, dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut.

2. Kemandirian proses peradilannya

Kemandirian proses peradilan disini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Kemandirian hakimnya

Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalm proses peradilan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :⁴¹

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/ seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh tersebut meliputi hal-hal yakni :

⁴¹ 54/*ibid*, hal. 58-64.

- a. peraturan perundang-undangan
- b. adanya intervensi terhadap proses peradilan
- c. hubungan hakim dengan penegak hukum lain
- d. adanya berbagai tekanan
- e. faktor kesadaran hukum
- f. faktor sistem pemerintahan (politik)

2) Doktrin Kebebasan Hakim vs Asas Legalitas (*Nulla poena sine lege*)

Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidak memihak dan berusaha memutus perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.⁴² Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/ untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam/ untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.⁴³

Menurut Paulus Effendie Lotulung, kekuasaan kehakiman yang merdeka juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil di dalam menjatuhkan putusan.⁴⁴ Istilah merdeka yang ada pada kedudukan hakim harus

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Loc. Cit.

⁴³ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op. Cit.*, hal. 51-52.

⁴⁴ Paulus effendie Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, <http://www.Ifip.Org/english/pdf/bali-seminar/Kebebasan%20Hakim%20-%20paulus%20lotulong.pdf>, diunduh Tanggal 2 Desember 2010.

sesuai dengan kedudukan badan kekuasaan kehakiman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini merdeka meliputi dua hal, yaitu :⁴⁵

1. merdeka dalam keadaan dan kedudukannya, yaitu setiap hakim adalah seorang pejabat yang otonom dan merdeka. Hal itu berarti bahwa di dalam organisasi badan kehakiman tidak berlaku prinsip bahwa hakim yang satu sebagai atasan berhak atau berkewajiban memberi instruksi kepada hakim lainnya sebagai bawahannya dalam menghadapi dan dalam usahanya menyelesaikan suatu perkara konflik yang kongkrit individu yang harus diadilinya. Hakim dalam hal itu tidak boleh dipengaruhi, apalagi diinstruksi oleh atasan atau oleh kalangan luar badan kehakiman,
2. merdeka dalam hal pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya itu, hakim leluasa dalam usahanya menemukan jawaban atas persoalan kongkrit yang dihadapinya itu. Ikatan satu-satunya yang mengikat hakim dalam hal itu ialah hanya prinsip-prinsip hukum dalam tata hukum Indonesia yang ada di dalam hukum dasar. Sejauh usahanya untuk itu telah dijalankan secara yuridis murni, hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan doktrin kebebasan hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya.⁴⁶ Dan dalam setiap putusan hakim harus mengandung *impartiality* atau sikap tidak memihak. Sikap tidak memihak inilah yang pada akhirnya akan melahirkan ide *equality* atau persamaan, sehingga semua pihak akan diperlakukan sama di muka hukum.⁴⁷

Mengingat peranan penting dari pengadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, maka terciptanya pengadilan yang merdeka, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.⁴⁸

⁴⁵ H. M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, ed.1, cet.1, Surabaya : Ubhara Press, 1998, hal. 66-67.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁴⁷ Aswandi, *Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2002/PN.PTK Tentang Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Modal Kerjasama Usaha*, Jurnal Yudisial; Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia, vol-I/no.- 01/Agustus 2007, hal. 1.

⁴⁸ Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Media Hukum dan Keadilan; teropong; Pengawasan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial, MaPPI-FHUI, vo.V no. 1, Maret 2006, hal. 10.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia itu sendiri telah dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Tentu hal tersebut didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundangundangan atau hukum yang berlaku.

Di dalam praktik tidak jarang sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap atau jelas sejas-jelasnya. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di samping itu kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa.

Apabila hakim menghadapi situasi yang demikian maka hakim tidak diperbolehkan menolak perkara, hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Justru sebaliknya hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum, bahkan kalau perlu dengan jalan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.⁴⁹ Hal ini dikarenakan dengan adanya peraturan hukum yang tidak jelas maka harus dijelaskan dan yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, yang mengatakan :

⁴⁹ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

“Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.”⁵⁰

Dari sini diharapkan hakim dengan inisiatif sendiri, pertimbangan sendiri, menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapinya. Adapun untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, hakim dalam mengadili perkara mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : (1) Hakim sebagai corong undang-undang; (2) Hakim sebagai penterjemah undang-undang dengan interpretasi; dan (3) Hakim menggunakan inisiatif sendiri (pertimbangan sendiri) atau otonom.⁵¹

Terkait dengan fungsi hakim dalam mengadili perkara, sebagaimana dijelaskan di atas, awalnya terdapat aliran yang bernama aliran legisme, yang dipelopori oleh Montesqueu, Rousseou, Fennet, dan lain-lain, yang berpandangan bahwa hakim tidak lebih sekedar corong atau terompetnya undang-undang (*La bouche de la loi*). Hal ini disebabkan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas.⁵²

Dalam perkembangannya, aliran legisme lama-lama mulai ditinggalkan, karena dianggap tidak mampu lagi memecahkan problem-problem hukum yang muncul.⁵³ Kemudian muncul pandangan bahwa hakim bukan lagi sebagai corong undang, undang, dimana menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, sejak kurang lebih 1850, orang condong pada peranan yang mandiri dalam pembentukan hukum oleh hakim. Hakim bukan lagi corong dari undang-undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum.⁵⁴

Hal inilah yang selanjutnya dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo sebagai ajaran tentang kebebasan hakim, ajaran bahwa hakim tidak hanya corong pembentuk undang-undang saja, tetapi secara otonom, mencipta, menyelami proses kemasyarakatan.⁵⁵

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁵¹ Wiarda, *Drie Typen Van de Rechtsvinding*, sebagaimana dikutip oleh Lintong O. Siahaan, *Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Terhadap Hakim*, Jurnal Hukum & Pembangunan, FHUI, Tahun ke-35 no. 4, Oktober-Desember 2005, hal. 409.

⁵² Bambang Sutyoso, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 89.

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵⁶ Adapun untuk hakim sendiri pada hakikatnya, dalam menjalankan tugas penemuan hukum, hakim harus bebas, baik dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak-pihak lain seperti : atasan, eksekutif, legislatif, dan sebagainya.⁵⁷

Berkenaan dengan pengertian dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) itu sendiri, ada pendapat dari Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, yang mengatakan :

“Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssverwijning* (pengkonkretan hukum).”⁵⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa :

“Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.”⁵⁹

Adapun sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah : perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.⁶⁰ Sedangkan berkenaan dengan metode penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, secara garis besar membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (konstruksi hukum)⁶¹, yang mana ketiga metode ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Metode Interpretasi

⁵⁶ Bambang Sutyoso, *Op. Cit.*, hal. 28.

⁵⁷ Lintang O. Siahaan, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Bambang Sutyoso, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hal. 49.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 37.

⁶¹ Bambang Sutyoso, *Op. Cit.*, hal. 80.

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Adapun metode interpretasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :⁶²

a. Interpretasi menurut bahasa

Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar “membaca undang-undang”. Interpretasi menurut bahasa ini harus logis juga.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Metode interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Interpretasi teleologis ini dinamakan juga interpretasi sosiologis, dimana metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.

c. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis atau interpretasi logis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangundangan dengan jalan menghubungkannya dengan undangundang lain. Hal ini disebabkan terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundangundangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.

d. Interpretasi historis

Makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jelas meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran ini dikenal sebagai interpretasi historis. Jadi penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-

⁶² Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Op. Cit.*, hal. 14-19.

undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.

e. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

f. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai ketentuan hukum.

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.⁶³

Dapat terjadi hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus, disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukumnya? untuk mengisi kekosongan itu digunakan metode yaitu :⁶⁴

a. *Argumentum per analogiam*

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan *metode argumentum per analogiam* atau *metode berfikir analogi*. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

b. Penyempitan hukum

⁶³ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hal. 105.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Op. Cit.*, hal. 21-27.

Kadang-kadang lagi peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (penyempitan hukum, *rechtsverfijning*). Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

c. *Argumentum a contrario*

Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya, ini merupakan metode *argumentum a contrario*. Ini merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan penemuan hukum melalui metode argumentasi ini, terdapat beberapa argumentasi keliru yang hendaknya oleh hakim dihindari, sebab hal ini termasuk merupakan kesesatan dalam hukum. Adapun argumentasi yang keliru tersebut, diantaranya yaitu :⁶⁵

a. *Argumentum ad Baculum*

Baculum artinya tongkat. Jenis kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan sebuah kesimpulan. Jenis argumentasi yang umumnya terjadi adalah menerima atau menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa, misalnya ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencari pekerjaan dan berbagai bentuk macam ancaman lain yang menakutkan. Jika suatu kasus yang diproses di pengadilan berakhir dengan keputusan batal demi hukum karena muncul surat sakti yang menghendaki dihentikannya proses hukum tersebut untuk kepentingan para penguasa, maka terjadilah kekeliruan penalaran.

b. *Argumentum ad Hominem*

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.2, Malang : Bayumedia, 2006, hal. 259-264.

Kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orang secara langsung, atau sebaliknya argumen yang menunjukkan pola pikir pada mengutamakan kepentingan pribadi. Contoh lain, yakni mendiskreditkan saksi karena ada anggota keluarganya yang pernah terindikasi terlibat organisasi terlarang. Seorang terdakwa yang berusaha mendapatkan hukuman ringan mungkin mencoba mempengaruhi keputusan hakim dengan mengatakan bahwa penderitaan yang akan dipikulnya sebagai akibat putusan sang hakim juga akan berbalik menimpa sang hakim atau keluarganya.

C. *Argumentum ad Ignorantiam*

Sebuah argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya, atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannya. Dalam bentuk yang paling umum, kesesatan seperti itu terjadi karena mengargumentasikan suatu proposisi sebagai sesuatu yang benar karena tidak terbukti bersalah, atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Elaborasi lebih lanjut dalam praktik, misalnya suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, adalah bersih. Pernyataan ini belum tentu benar, karena koruptor tersebut sudah sempat menghilangkan barang bukti. Sebaliknya belum tentu seseorang yang dipenjara adalah orang yang bersalah, sebagaimana dibuktikan dalam kasus Sengkon dan Karta.

d. *Argumentum ad Misericordiam*

Suatu argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasihan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh dari argumen tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak menitikberatkan pada fakta yang dipersalahkan, melainkan semata-mata pada perasaan belas kasihan. Seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu formula untuk bayinya yang sedang sakit, pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia datang dari keluarga yang tidak mampu. Kesesatan tersebut terjadi untuk pembuktian tidak bersalah, seolah-olah orang miskin diargumentasikan boleh mencuri demi kehidupan anaknya.

Dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi seperti itu dapat digunakan, tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.

e. *Argumentum ad Populum*

Kekeliruan pikir semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima secara umum. Argumen semacam itu digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas. Argumen seperti itu dalam bentuk lain dilakukan dengan cara menarik massa, misalnya membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian.

f. *Argumentum ad Verecundiam* atau *Argumentum Auctoritatis*

Dalam menghadapi permasalahan hukum yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi-saksi yang dianggap ahli dan pakar yang menguasai permasalahan hukum yang dihadapi. Orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai “dewa” yang menguasai permasalahan tersebut sehingga pendapat mereka dianggap paling benar dan sah. Kesimpulan yang dibuat seperti itu akan sangat menyesatkan.

3. Metode Eksposisi / Konstruksi Hukum

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik.⁶⁶

Metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁶⁷

Meskipun hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya, termasuk pula bebas dalam melakukan penemuan hukum, namun kebebasan yang dimaksud tersebut tidaklah mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan. Dengan kata lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka harus diciptakan

⁶⁶ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁶⁷ *Ibid*

batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.⁶⁸ Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :⁶⁹

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.

Segala putusan hakim /pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Hakim memutus semata-mata untuk keadilan

Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan umum (*the general principle of natural justice*).

Tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menindak hakim karena putusannya dianggap tidak adil. Bahkan negara pun tidak dapat menuntut tanggungjawab

⁶⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung : Unisba, 1995, hal. 12 sebagaimana dikutip oleh Pontang Moerad, *Op. Cit.*

⁶⁹ *Ibid*

atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan. Tindakan terhadap hakim hanya mengenai tingkah laku pribadi yang merugikan negara atau menurunkan martabat kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu di dalam melakukan penafsiran, dan konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan umum (*the general principle of natural justice*). Dari adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan hakim, terutama pembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapat dilihat terdapat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan hakim. Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berupa *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi.

Terkait dengan adanya hubungan antara asas legalitas berupa *nulla poena sine lege* dengan kebebasan hakim dapat diuraikan yakni pada awalnya ajaran asas legalitas ini diciptakan dan dikembangkan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach (1775-1833), jurisdiktor dari Jerman, yang mana menurut pendapat dari Bambang Poernomo, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang); *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).⁷⁰ Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*,⁷¹ yang mengandung arti : tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan.

Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas, sulitlah dinafikan bahwa asas tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, sebagai ciri utama tujuan hukum pidana aliran klasik.⁷² Dimana menurut pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, mengatakan aliran klasik ini dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang, yaitu :⁷³

1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada penuntutan tanpa

⁷⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Loc. Cit.*

⁷¹ *Ibid*

⁷² Jan Rummelink, *Op. Cit.*

⁷³ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hal. 11.

undang-undang;

2. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau akibat kesalahan semata;
3. Asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.

Berkaitan dengan asas legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach, sebenarnya dikehendaki penjeraan yang tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan, sehingga kejahatan dan pidananya harus dicantumkan dengan jelas. Teori asas legalitas Feuerbach ini kemudian dikenal dengan *psychologische zwang*.⁷⁴ Artinya untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, bukan hanya perbuatan-perbuatan itu saja yang harus dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana, tetapi juga macam-macam pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana dapat mengetahui terlebih dahulu apa pidana yang diancamkan.⁷⁵ Dengan cara demikian ini maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.⁷⁶ Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psychennya*, lalu diadakan tem atau tekanan untuk tidak berbuat, dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri.⁷⁷

2. Penjatuhan Putusan

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan *vonis* tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, antara lain dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum, bisa berupa banding maupun kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran

⁷⁴ *Ibid*, hal. 13.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 25

⁷⁷ *Ibid*

hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁷⁸ Dapat pula dikatakan bahwasanya *vonis* merupakan puncak idealisme keagungan bekerjanya sistem hukum.⁷⁹ Sedangkan bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya olehnya bagi tertuduh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat* dan *strafmadaliteit*).⁸⁰

Menurut pendapat Leden Marpaung, putusan hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁸¹ Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, mengatakan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.⁸²

Lebih lanjut KUHAP juga menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 195. Menurut pendapat Eva Achjani Zulfa, keputusan hakim (yang berkekuatan tetap) adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang berupa : a. pembebasan (*vrijspraak*) – Pasal 191 ayat (1) KUHAP; b. pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*) – Pasal 191 ayat (2) KUHAP; c. penjatuhan pidana Pasal 193 ayat (1) KUHAP.⁸³ Lebih lanjut Eva Achjani Zulfa menjelaskan, keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa.⁸⁴

Setiap putusan hakim, baik yang berisi pemidanaan ataupun yang bukan pemidanaan, kepala putusannya selalu berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 dan 199

⁷⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Bandung : Alumni, 2007, hal. 201.

⁷⁹ Abdul Wahid, *Konfusius Melawan Mafia Kasus*, Desain Hukum, Newsletter Komisi Hukum Nasional, vol.10, no.2, Maret 2010, hal. 18.

⁸⁰ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984, hal. 88

⁸¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hal. 406.

⁸² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 203.

⁸³ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hal. 15.

⁸⁴ *Ibid*

KUHAP). Terhadap hal ini ada pendapat dari Bismar Siregar, seorang mantan hakim agung, yang mengatakan :

“Dengan demikian dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar.”⁸⁵

Adapun di dalam menjatuhkan putusan berupa pembedaan, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk pula Undang-Undang Narkotika. Dimana menurut pendapat dari Collin Howard, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu :⁸⁶

1. Sistem *fixed / definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
2. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
3. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.
4. Sistem *interdeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Salah satu contohnya terdapat pada Pasal 112 ayat (1), yang menyebutkan :

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

⁸⁵ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hal. 19.

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Peradilan Born Bali*, Op.Cit., hal. 25-26.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan adalah Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh hakim, termasuk hakim PN Kuala Kapuas, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas *nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak pidana tanpa undang-undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas *nulla poena sine lege* ini. Adapun menurut pendapat hakim PN Kuala Kapuas, tindakan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh seorang hakim tidaklah melanggar asas legalitas, sebab penjatuhan pidana tersebut bertujuan demi terwujudnya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Dan menurut hakim, apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibanding kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hukum Pidana*. Cet.2, Jakarta : Erlangga, 1984.
- Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga, 1985.
- Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2009.
- Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: PTIK Press, 2005.
- Andi Widjajanto, Cornelis Lay dan Makmur Keliat. *Intelijen: Velox et Exacatus*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006.
- Bambang Poernomo Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, 1998.
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- _____, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- _____, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan

- Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administasi, Inter Media, Jakarta, 1991.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- _____, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Hartono Hadisoeparto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1982.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Is Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995.
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi””, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- _____, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.
- _____, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, FE UI, Jakarta, 1996.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Moekijat, Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, Kapita Seleksi Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Press, Malang, 2005.
- S. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986.
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, CV. Mandor Maju, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 1993.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat,, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tonry, Micahel., *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996.